

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan
(Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat)

¹Dana Ramadhan, ²Fazalqo'ni, ³Deris Desmawan

¹Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553210078@untirta.ac.id

²Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553210074@ac.id

³Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, derisdesmawan@untirta.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Human Development Index, the impact of education, and the impact of open unemployment on the poverty level from 2017 to 2021(West Provincial Case Study).Double regress method.The results showed that the percentage variable open unemployment rate has a positive and significant effect on the level of poverty, while the variable level of education and HDI negative and significant effect on the level of poverty. Results based on the simultaneous Test (Test F) showed that the open unemployment rate, education level and HDI simultaneously affect the level of impoverishment.

Keywords: *Poverty, Open Unemployment Rate, Education Human Development Index.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang bertujuan untuk menjadi negara maju dan mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, maka perlu dipahami pembangunan bidang ekonomi. Salah satu aspek yang dapat dilihat adalah faktor kemiskinan yaitu pengangguran, tingkat pendidikan dan indeks pembangunan manusia. Dalam konteks ini, pengangguran merupakan masalah persisten yang disebabkan oleh ketidakseimbangan perekonomian suatu negara atau wilayah (Jhingan, 2012).

Pengangguran sendiri merupakan masalah klasik dan masih ada sampai sekarang, pengangguran merupakan masalah yang sulit untuk diatasi, jika tidak ditangani dengan serius maka pengangguran akan berdampak besar bagi perkembangan perekonomian nasional, baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. Namun disini kita tidak akan membahas tentang negara Indonesia, kita akan membahas sebuah wilayah atau provinsi yang padat penduduknya yaitu Jawa Barat. Masyarakat di Jawa Barat juga menghadapi kemiskinan, dan pendapatan yang tidak merata di antara masyarakatnya.

Kemiskinan adalah masalah konstan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Tentu saja, keluar dari kemiskinan bukanlah masalah yang mudah diatasi, melainkan menjadi perhatian setiap negara. Masalah ini juga merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan berbagai upaya, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan kelompok pelaku ekonomi tidak seimbang

sehingga sebagian masyarakat tidak dapat ikut menikmati hasil pembangunan (Soegijoko, 2001).

Angka tingkat pendidikan yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung meningkat signifikan dari 62,7% pada 2017 menjadi 63,1% pada 2018 dan kembali meningkat menjadi 63,5% pada tahun berikutnya. Berdasarkan peningkatan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan selalu meningkat setiap tahunnya.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia, yang mencerminkan tingkat pembangunan kualitas manusia dan berperan sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia secara menyeluruh, baik mental, fisik maupun intelektual, merupakan modal dasar bagi suatu negara untuk keluar dari kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia, alat untuk mengukur kualitas pembangunan manusia, telah menjadi variabel penting dalam pengentasan kemiskinan di suatu negara.

BPS melaporkan data IPM tahun 2017 sebesar 70,69%, tahun 2018 sebesar 71,3%, meningkat 0,69%, dan tahun berikutnya tahun 2019 sebesar 72,03, meningkat sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya, dan data tersebut diperoleh BPS pada tahun 2020 sebesar 72,09%, dibandingkan dengan tahun 2019 Peningkatan tahunan sebesar 0,6%, kemudian pada tahun 2021 berikutnya diperoleh data sebesar 72,45%, meningkat 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

Landasan Teori

Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi taraf hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ketidakmampuan ini ditandai dengan pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan transportasi. Kapasitas

pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada kemampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Menurut Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai tidak mampu memenuhi standar hidup minimum.

Kondisi orang yang disebut miskin dapat dipahami berdasarkan kemampuan pendapatannya untuk memenuhi taraf hidupnya (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya taraf hidup suatu masyarakat tidak hanya terpenuhinya kebutuhan pangan, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Tempat tinggal atau tempat tinggal yang layak merupakan salah satu taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan keadaan ini, suatu masyarakat disebut miskin jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk berkembang (Suryawati, 2004).

Menurut Chambers (Chriswardani Suryawati, 2005)

Tunjukkan bahwa kemiskinan adalah konsep yang komprehensif, Ada lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*proper*)
2. tak berdaya (*powerless*)
3. Kerentanan terhadap keadaan darurat (*state of emergency*)
4. Tergantung (*dependence*)

Isolasi geografis dan sosiologis Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka tercipta karena tambahan pertumbuhan lapangan kerja lebih rendah daripada pertumbuhan angkatan kerja yang mengakibatkan sejumlah besar pekerja tidak dapat

memperoleh pekerjaan. Menurut Porket (1995), pengangguran publik individu dapat disebabkan oleh "friksi" dalam proses pencarian kerja, upah riil yang tinggi, ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam hal keterampilan dan lokasi, dan inovasi teknologi. menyebabkan pengangguran publik. Menurut data Supas (2017), tingkat pengangguran terbuka kelompok usia muda(15-29tahun) di Jawa Barat sangat tinggi yaitu 21,56%, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT kelompok usia dewasa (30 tahun). keatas) yang hanya 2,80%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pendatang baru di dunia kerja menghadapi hambatan yang signifikan dalam pekerjaan mereka.



Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Sumber: BPS (berbagai edisi)

Di Jawa Barat, peningkatan pengangguran terbuka didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk dan tidak adanya perluasan angkatan kerja yang menyertainya. Beberapa daerah memiliki anak muda yang memasuki dunia kerja tetapi tidak fokus pada pekerjaannya. Pekerjaan kaum muda merupakan tantangan global.

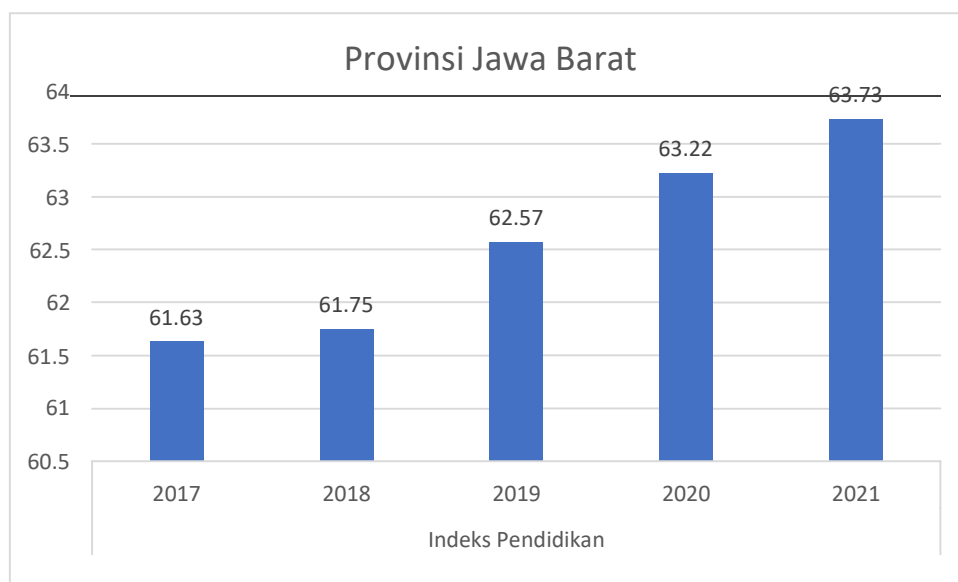
Menurut Corbanese dan Rosas (2015) secara keseluruhan, orang muda tiga kali lebih mungkin untuk menganggur dari pada orang dewasa. Masa transisi antara sekolah dan bekerja akan terjadi di usia muda. Menurut Sziraczki dan Reerink (2004) transisi dari sekolah ke dunia kerja, banyak anak muda yang memasuki dunia kerja terlalu muda untuk siap menghadapi transisi ini. Kaum muda harus melakukan transisi dari sekolah ke pasar kerja melalui pencarian kerja singkat atau pengangguran.

Pendidikan

Pendidikan (formal) merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kualitas tenaga

kerja. Ketika semua pekerja yang memenuhi syarat secara aktif terlibat dalam perekonomian, itu meningkatkan output barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan investasi, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan penguasaan teknologi dapat menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Kort, M.P 2002:539). Studi Denison (1967: 326) di Amerika Serikat menemukan bahwa hal ini pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan penduduk. Sumber daya manusia yang berkualitas dan penguasaan teknologi dapat menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Kort, M.P 2002:539)

Orang yang mengenyam pendidikan (formal) sebelum lulus perguruan tinggi memiliki kecerdasan yang relatif lebih tinggi daripada mereka yang hanya tamat SMA. Karena pendidikan tinggi lebih terbuka, terdapat perbedaan fleksibilitas dalam menentukan jenis bakat dan/atau kesempatan kerja yang berkualitas tinggi. Mereka relatif pilih-pilih/pilih-pilih dalam hal memilih pekerjaan. Besaran/tingkat gaji dan tingkat kenyamanan lingkungan kerja dapat menjadi pemicu. Bahkan sebagian dari mereka lebih memilih menganggur (sementara) daripada bekerja. Pengangguran jenis ini disebut pengangguran sementara.



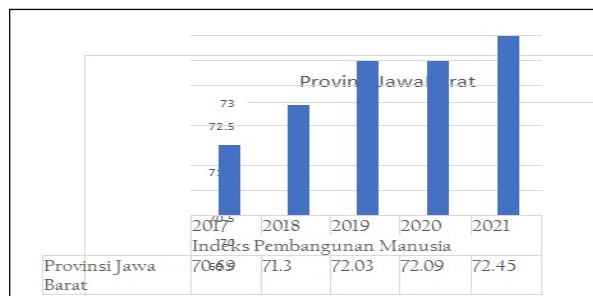
Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Sumber : BPS (berbagai edisi)

Seperti terlihat dari tabel diatas, tingkat pendidikan terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 61,63% dari tingkat pendidikan, sedangkan tingkat pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 63,73% dari tingkat pendidikan. Ketimpangan pendidikan di berbagai daerah di Jawa Barat masih sering terjadi, yang membuat pemerintah harus lebih memperhatikan sektor pendidikan karena pendidikan adalah kunci kemakmuran suatu negara.

Pembangunan manusia diartikan sebagai proses perluasan pilihan penduduk (expanding people's choice). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana orang mencapai hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. HDI diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode perhitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS melakukan perubahan baru pada metode penghitungan IPM pada tahun 2014, dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM terdiri dari tiga dimensi dasar, yaitu umur yang panjang dan sehat, pengetahuan dan taraf hidup yang layak. Umur panjang dan sehat digambarkan dengan umur harapan hidup saat lahir (UHH), yaitu angka harapan hidup bayi baru lahir dalam tahun, dengan asumsi pola kematian menurut umur lahir sama sepanjang umur bayi. Pengetahuan diukur dengan rata-rata tahun pendidikan dan tahun yang diharapkan dari indikator pendidikan. Rata-rata Tahun Pendidikan (RLS) adalah rata-rata lama (tahun) pendidikan formal bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Tahun Sekolah yang Diharapkan (HLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun pendidikan formal yang akan dialami seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Standar hidup yang layak digambarkan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan oleh nilai dan paritas daya beli dari pengeluaran perkapita. IPM dihitung dari mean geometrik Indeks Kesehatan, Indeks Pengetahuan, dan Indeks Pengeluaran. Perhitungan ketiga eksponen dilakukan dengan menormalkan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponeneksponen.



Gambar 3. Grafik Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Sumber : BPS (berbagai edisi)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan jangka panjang. Untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia, dua aspek perlu diperhatikan, kecepatan dan status pencapaian. Secara keseluruhan, pembangunan manusia di Jawa Barat terus meningkat antara 2017 dan 2021. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat naik dari 70,69 pada 2017 menjadi 72,45 pada 2021. Selama periode ini, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat tumbuh rata-rata 0,94% per tahun. Antara 2017 dan 2021, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat telah membuat kemajuan besar, dan situasi pembangunan manusia Jawa Barat telah membaik. Saat ini pembangunan manusia di Jawa Barat berada pada status “tinggi”, sedangkan pada tahun 2017-2017, pembangunan manusia di Jawa Barat hanya berada pada status “sedang”.

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat, dan tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel bebas.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), survei antar sensus (supas), dan sumberlain yang masih relevan dengan penelitian. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk data panel, dan bentuk data sekundernya adalah data time series 2017-2021 dan (data cross section) yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Pemilihan Model

Sebelum menentukan estimasi regresi linier berganda, terlebih dahulu harus ditentukan teknik estimasi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis klasik dan pemilihan model terbaik hipotesis klasik menghasilkan model korelasional sebagai teknik terbaik.

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

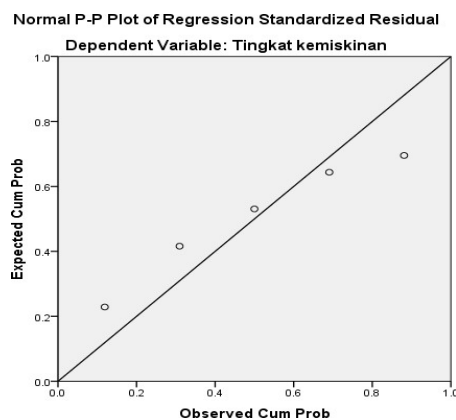
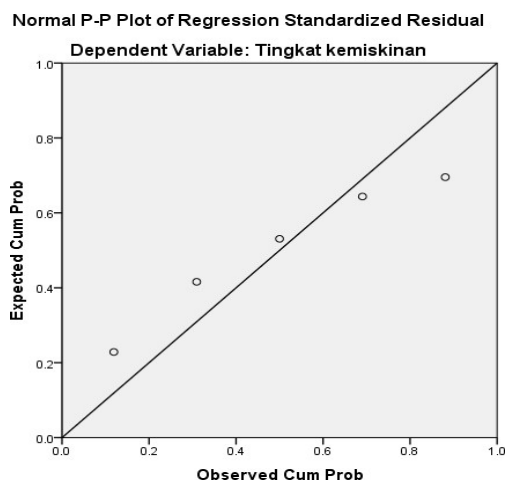
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	33.146	20.349		1.629	.351		
	Tingkat pengangguran terbuka	.610	.400	.916	1.528	.369	.113	8.881
	Tingkat pendidikan	.316	.608	.508	.519	.695	.042	23.653
	Tingkat IPM	-.716	.623	-.666	-1.149	.456	.120	8.315

a. Dependent Variable: Tingkat kemiskinan

Sumber: BPS (Data diolah)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3 di atas, nilai VIF masing-masing variabel menunjukkan bahwa tingkat pengangguran sebesar $8,881 < 10,00$, dan nilai Tolerance sebesar $0,113 > 0,100$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari uji multikolinearitas. Kemudian pada tingkat Pendidikan nilai VIF adalah $23,653 > 10,00$, dan nilai Toleransi $0,042 < 0,100$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terbebas dari uji multikolinearitas. Selanjutnya pada variable tingkat IPM menunjukkan angka sebesar $8.315 < 10,00$ dan nilai Tolerance $0,120 > 0,100$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari Uji Multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varians dari residual semua pengamatan dalam model regresi linier. Uji ini merupakan salah satu uji hipotesis klasik yang harus dilakukan untuk regresi linier. Jika asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat prediksi. Pada uji heteroskedastisitas di atas

dapat disimpulkan bahwa data tersebar dan tidak menghasilkan pola tertentu, sehingga data tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 2. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^a	.960	.838	.30596	2.666

- a. Predictors: (Constant), Tingkat IPM, Tingkat pengangguranterbuka, Tingkat pendidikan
- b. Dependent Variable: Tingkatkemiskinan

Uji autokorelasi adalah analisis statistik yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu variabel dalam model prediktif berubah dari waktu ke waktu. Uji adanya gejala autokorelasi dengan melihat nilai “Durbin-Watson”. Jika nilai Durbin-Watson antara 2 dan -2, Anda dapat menyimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Dari pengujian diatasdapatdisimpulkanbahwanilai“Durbin-Watson”adalahantara2dan-2.2>Durbin-Watson (2,666) > 2 maka data tersebut bukan tanpaautokorelasi.

Uji T tabel

Tabel 3. Uji T Coefficients^a

Model	nstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1 (Constant)	33.146	20.349		1.629	.351		
Tingkat pengangguran terbuka	.610	.400	.916	1.528	.369	.113	8.881
Tingkat pendidikan	.316	.608	.508	.519	.695	.042	23.653
Tingkat IPM	-.716	.623	-.666	-1.149	.456	.120	8.315

- a. Dependent Variable: Tingkat kemiskinan

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, variabel tingkat pengangguran terbuka secara parsial

berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Barat dari tahun 2017 hingga 2021. Hal ini berdasarkan nilai t -hitung sebesar 1,528, nilai probabilitas sebesar 3,182 dan nilai koefisien sebesar 8,881. Artinya jika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 8,881%. Hasil ini konsisten dengan teori yang menjelaskan hubungan positif antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini, penurunan TPT diharapkan dapat menurunkan persentase kemiskinan di daerah tersebut, karena penurunan TPT dapat menurunkan angka kemiskinan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil temuan, variabel tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat dari tahun 2017 hingga 2021. Nilai t -hitung 0,519, nilai probabilitas 3,182, dan nilai koefisien 23,653. Artinya, untuk setiap kenaikan 1% tingkat pendidikan, angka kemiskinan turun sebesar 3,182%. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan sangat berpengaruh, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin banyak keterampilan yang mereka kembangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitasnya (Astrini, 2013). Pendidikan perlu menjadi titik fokus untuk mengatasi kebodohan dan keterbelakangan sosial ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil temuan, variabel IPM secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat dari tahun 2017 hingga 2021. Nilai t -hitung sebesar -1,149, nilai probabilitas sebesar 3,182, dan nilai koefisien sebesar 8,315. Artinya, setiap kenaikan 1 persen Indeks Pembangunan Manusia, maka angka kemiskinan turun sebesar 3,182%. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa IPM berdampak negative terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan (Mahihody, Engka, dan Luntungan, 2018), (Afolayan et al., 2019), (Mahroji dan Nurkhasanah, 2019), (Astrid dan Soekapdjo, 2020) dan (Pratiwi, Marseto, dan Sishadiyati), 2021), yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengangguran terbuka 2017-2021 berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.
2. Variabel tingkat pendidikan dan tingkat indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat dari tahun 2017 hingga 2021.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal strategi penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah di Jawa Barat harus focus pada industri padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga

- kerja lebih banyak atau mengembangkan aturan tentang kemudahan pemberian kredit kepada masyarakat untuk meningkatkan pengembangan usahanya. Atau buat bisnis baru yang nantinya bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan
2. Pemerintah daerah akan lebih memperhatikan pembangunan manusia. Dengan meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan mengembangkan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya tersebut diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Kedepannya juga diharapkan pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia.
 3. Pemerintah diharapkan lebih mengarahkan dan mengatur investasi pada industri padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran melalui regulasi investasi yang ada.
 4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel ekonomi dan non-ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi pengangguran dan menambah periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menginterpretasikan hasil penelitian yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- A. Pasay & Indrayanti, 2012; Aristina et al., 2017; David, 2021; Hasan & Muhammad, 2018; Kota et al., 2020; KUSUMAYANTI et al., 2015; Putra & Yasa, 2019; Saputra, 2014; Seran, 2017; Setiawan et al., n.d.; Spasial, n.d.; Syaifudin et al., 2022; Umami, 2013; Utami et al., 2017; Wardhana et al., 2019; Yuniasih et al., 2013).
- Arifin, 2019 A. Pasay, N. H., & Indrayanti, R. (2012). Pengangguran, Lama Mencari Kerja, dan Reservation Wage Tenaga Kerja Terdidik. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 116–135. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.493>
- Arifin, A. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.18>
- Aristina, I., Budhi, M. K., Wirathi, I. G. A. ., & Darsana, I. B. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(5), 677–704.
- David, L. (2021). *Kemiskinan & Kebebasan: Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Global*. 1– 153.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). 1| *Pembangunan Ekonomi*. Kajian Terhadap Tingkat Pemerataan Pendidikan Menggunakan Analisis Biplot Klasik Dan Biplot Kekar. *E-Jurnal Matematika*, 4(2), 37. <https://doi.org/10.24843/mtk.2015.v04.i02.p086>
- Kota, D. A. N., Provinsi, D. I., Barat, J., Ekonomi, F., Padjadjaran, U., & Barat, J. (2020). ISSN:2337-3067 *PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN KUSUMAYANTI, N. L. A., SUKARSA, I. K. G., OKA, T. B., & N. KENCANA, I. P. E. PENDAHULUAN Indikator keberhasilan ekonomi dari suatu wilayah melalui perkembangan aktivitas perekonomian yang sering dikenal dengan pertumbuhan ekonomi . Faktor- faktor yang mempengaruhi*. 9, 835–850.
- Putra, I. M. B. W. S. S., & Yasa, I. N. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Produksi Dan Pendapatan Pengusaha Industri Genteng. *Buletin Studi*

- Ekonomi*, 24(1), 84. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i01.p06>
- Saputra, W. (2014). *Pembangunan Ekonomi & Terancamnya Hak Dasar Masyarakat: Kritik dan Kajian terhadap Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025*.
- Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 59–71. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i01.p07>
- Setiawan, E., Didu, S., & Ginanjar, R. A. F. (n.d.). (*Studi Kasus Pada Sejumlah Provinsi di Indonesia*). 1–21.
- Spasial, A. (n.d.). *Analisis Spasial...(Rita R)*. 23–30.
- Syaifudin, R., Verliana, A. D., Setyadi, S., & Desmawan, D. (2022). *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020*. 3(2), 117–124. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1688>.
- Umami, U. (2013). Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(4), 343. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i4.6673>.
- Utami, T. W., Rohman, A., & Prahutama, A. (2017). Pemodelan Regresi Berganda Dan Geographically Weighted Regression Pada Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah. *Media Statistika*, 9(2), 133. <https://doi.org/10.14710/medstat.9.2.133-147>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Ibrahim, Y. F. (2019). Pengangguran Usia Muda Di Jawa Barat (Menggunakan Data Sakernas). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 1049. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i09.p04>
- Yuniasih, A. F., Firdaus, M., & Fahmi, I. (2013). Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 63–81. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.447>